

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023
(AUDITED)

UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, maka setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut disusun selain untuk memenuhi ketentuan peraturan, juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan merupakan akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

Pelaihari, Juni 2023

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Laporan Realisasi Keuangan	i
2. Neraca.....	iii
3. Laporan Operasional.....	iv
4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	v
5. Catatan atas Laporan Keuangan.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Data Umum	1
1.2 Struktur Organisasi.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	4
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	6
2.1 Ekonomi Makro.....	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan	6
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan.....	7
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja.....	9
2.2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
2.2.4 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	11
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	12
3.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan.....	12
3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	12
3.1.2 Neraca	23
3.1.3 Laporan Operasional.....	39
3.1.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	49
IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13
Tabel 2 Rincian Lain- Lain PAD Yang Sah	13
Tabel 3 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16
Tabel 4 Rincian Dana Perimbangan	16
Tabel 5 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16
Tabel 6 Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17
Tabel 7 Rincian Belanja Pegawai	18
Tabel 8 Rincian Belanja Barang dan Jasa	19
Tabel 9 Rincian Belanja Modal Tanah	20
Tabel 10 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21
Tabel 11 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
Tabel 12 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22
Tabel 13 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	22
Tabel 14 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	24
Tabel 15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	25
Tabel 16 Piutang Transfer Pemerintah	26
Tabel 17 Penyisihan Piutang	26
Tabel 18 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD	27
Tabel 19 Rincian Investasi Jangka Panjang	27
Tabel 20 Rincian Aset Tetap	28
Tabel 21 Rincian Saldo Tanah	28
Tabel 22 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin	29
Tabel 23 Rincian Gedung dan Bangunan	31
Tabel 24 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	31
Tabel 25 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	32
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
Tabel 27 Rincian Saldo Aset Lainnya	35
Tabel 28 Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya	35
Tabel 29 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37
Tabel 30 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	37
Tabel 31 Rincian Utang Belanja	38
Tabel 32 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	39
Tabel 33 Pendapatan LO	39
Tabel 34 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO	40

Tabel 35 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO	40
Tabel 36 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO	41
Tabel 37 Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	41
Tabel 38 Perbedaan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LRA dan LO	41
Tabel 39 Rincian Beban.....	41
Tabel 40 Rincian Beban Pegawai	42
Tabel 41 Rincian Beban Barang Pakai Habis.....	43
Tabel 42 Selisih Beban Persediaan	43
Tabel 43 Rincian Beban Jasa	44
Tabel 44 Selisih Beban Jasa.....	45
Tabel 45 Rincian Beban Pemeliharaan	45
Tabel 46 Rincian Beban Perjalanan Dinas	46
Tabel 47 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	46
Tabel 48 Rincian Beban Penyusutan.....	47
Tabel 49 Rincian Beban Amortisasi.....	47
Tabel 50 Rincian Beban Transfer	48
Tabel 51 Beban Tak Terduga.....	48
Tabel 52 Rincian Surplus/ Beban Defisit Non Operasional	49
Tabel 53 Koreksi Ekuitas	50
Tabel 54 Rincian Koreksi Ekuitas	50

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Realisasi PAD 2023	12
Grafik 2 Rincian Realisasi PAD 2023.....	12
Grafik 3 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer 2023	15
Grafik 4 Realisasi Belanja Operasi 2023	18
Grafik 5 Realisasi Belanja Modal 2023	20



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Telp. (0512) 21274, 21101 Fax. (0512) 21101

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai mana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari , Juni 2023

Pengguna Anggaran,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	1.567.682.570.490,00	2.116.103.553.911,76	134,98	1.998.312.342.100,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.186.674.341,00	66.352.202.569,76	154,69	32.982.696.754,81
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.005.308.674,00	12.005.672.488,00	100,00	11.010.810.384,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.181.365.667,00	56.346.530.081,76	175,09	21.951.886.370,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.522.296.931.980,00	2.047.480.166.938,00	134,50	1.963.205.983.275,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.287.512.438.980,00	1.733.919.341.926,00	134,67	1.667.151.026.122,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	548.181.440.800,00	996.224.548.856,00	181,73	938.789.879.264,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	493.534.142.000,00	511.784.754.631,00	103,70	491.839.636.893,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	245.796.856.180,00	225.910.038.439,00	91,91	238.521.509.965,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	112.923.793.000,00	112.845.962.320,00	99,93	114.436.736.400,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	10.342.946.000,00
4.2.02.04	Dana Desa	112.923.793.000,00	112.845.962.320,00	99,93	104.093.790.400,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	181.618.220.753,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	2.143.662.071,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	2.143.662.071,00
5	BELANJA	54.193.780.548,00	30.125.288.877,00	55,59	19.808.587.311,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.546.361.366,00	16.783.076.878,00	90,49	15.525.928.281,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.113.769.343,00	7.605.725.320,00	93,74	7.409.582.520,00
5.1.02	Belanja Barang	10.432.592.023,00	9.177.351.558,00	87,97	8.116.345.761,00
5.2	BELANJA MODAL	13.474.504.037,00	12.801.312.000,00	95,00	3.536.233.030,00
5.2.01	Belanja Tanah	200.572.639,00	36.954.000,00	19,42	228.002.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	13.260.545.300,00	12.750.658.000,00	96,15	3.267.078.630,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	13.386.098,00	11.700.000,00	87,40	26.552.400,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0	14.600.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	22.172.915.145,00	540.899.999,00	2,44	746.426.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	22.172.915.145,00	540.899.999,00	2,44	746.426.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	TRANSFER	246.343.464.346,00	244.652.753.666,00	99,31	224.230.043.540,00
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	246.343.464.346,00	244.652.753.666,00	99,31	224.230.043.540,00
6.1.01	Bagi Hasil Pajak	6.124.680.450,00	6.111.780.450,00	99,79	4.895.286.950,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	240.218.783.896,00	238.540.973.216,00	99,30	219.334.756.590,00
7.1	SURPLUS / DEFISIT	1.267.145.325.596,00	1.841.325.511.368,76	145,31	1.754.273.711.249,81
7.1.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	906.951.811.440,76	906.951.811.440,76	100,03	610.994.644.033,83
7.1.02	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	831.703.550.940,00	831.703.550.940,76	100,00	604.990.188.933,83
7.1.05	Pencairan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	0,00
7.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	248.360.500,00	0	6.004.455.100,00
7.2.01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.318.896.928,00	58.318.896.928,00	100,00	75.000.000.000,00
7.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
7.2.04	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.318.896.928,00	28.318.896.928,00	100,00	25.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	848.833.014.512,76	848.833.014.512,76	100,03	535.994.644.033,83
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	2.115.329.979.609,00	2.689.958.525.881,54	127,15	2.290.268.355.283,64



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	131.310.530.756,00	845.739.084.934,06
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	486.943.067,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.381.142.263,12	24.774.027.695,24
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	226.152.417.256,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	58.444.898.394,85	50.656.124.065,67
Penyisihan Piutang	(15.908.251.323,06)	(9.515.579.754,62)
Beban Dibayar Dimuka	1.781.232,00	0,00
Persediaan	9.735.500,00	8.289.100,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	(1.850.186.248.189,60)
JUMLAH ASET LANCAR	434.879.197.145,91	(938.524.302.149,25)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen	170.343.210.534,27	144.405.364.828,06
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	170.343.210.534,27	144.405.364.828,06
ASET TETAP		
Tanah	194.450.545.560,04	194.946.396.723,77
Peralatan dan Mesin	13.536.035.489,90	6.718.024.945,15
Gedung dan Bangunan	(6.195.112.905,86)	10.351.568.784,39
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.289.967.205,08	85.977.100,00
Aset Tetap Lainnya	27.410.196,00	2.200.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	539.361.379,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(271.092.377.289,18)	(9.445.757.602,49)
JUMLAH ASET TETAP	(29.444.170.365,02)	202.658.409.950,82
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	56.160.390.391,32
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	56.160.390.391,32
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	107.309.000,00	107.309.000,00
Aset Lain-lain	1.028.718.986,74	322.104.661.370,51
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(68.549.000,00)	(55.629.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(878.632.553,39)	(1.033.789.775,01)
JUMLAH ASET LAINNYA	188.846.433,35	321.122.551.595,50
JUMLAH ASET	575.967.083.748,51	(214.177.585.383,55)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(3.871.951.804,00)	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	94.712.256,42	143.767.606,65
Utang Belanja	3.885.978.172,00	13.753.851,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	224.000.953.163,00	41.148.951.053,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	224.109.691.787,42	41.306.472.510,65
JUMLAH KEWAJIBAN	224.109.691.787,42	41.306.472.510,65
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	952.514.069.785,15	1.367.843.531.947,40
JUMLAH EKUITAS	952.514.069.785,15	1.367.843.531.947,40
JUMLAH EKUITAS	952.514.069.785,15	1.367.843.531.947,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.176.623.761.572,57	1.409.150.004.458,05



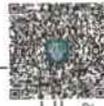


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	1.716.368.309.441,42	2.176.117.747.957,41	(459.749.438.515,99)	-21,13
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.662.418.814,53	35.578.200.299,06	32.084.218.515,47	90,18
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.595.463.789,00	12.538.157.208,28	57.306.580,72	0,46
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.066.955.025,53	23.040.043.090,78	32.026.911.934,75	139,01
08.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.644.006.638.186,85	2.138.379.085.769,35	(494.372.447.582,50)	-23,12
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.444.004.192.928,00	1.946.912.915.925,00	(502.908.722.997,00)	-25,83
08.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	-100,00
08.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50	10,42
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.699.252.440,04	2.160.461.889,00	2.538.790.551,04	117,51
08.03.01	Pendapatan Hibah	4.699.252.440,04	2.160.461.889,00	2.538.790.551,04	117,51
09	BEBAN	392.708.890.993,86	374.153.029.189,97	18.555.861.803,89	4,96
09.01.00	Beban Pegawai	7.603.944.088,00	7.409.582.520,00	194.361.568,00	2,62
09.02.00	Beban Persediaan	1.488.571.783,00	1.015.865.330,00	472.706.453,00	46,56
09.03.00	Beban Jasa	5.460.776.296,00	5.878.708.249,00	(417.931.953,00)	-7,11
09.04.00	Beban Pemeliharaan	-32.837.786.813,00	84.710.500,00	(32.922.487.313,00)	-38,864
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	2.032.572.958,00	1.174.860.241,00	857.712.717,00	73,02
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	6.392.544.303,84	3.064.169.783,55	3.328.374.520,29	108,62
08.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	267.173.262.327,02	232.901.685.941,84	34.271.676.385,18	14,72
09.12.00	Beban Transfer	131.806.771.346,00	120.136.253.140,00	11.670.518.206,00	9,71
09.13.00	Beban Lain-lain	3.588.234.705,00	2.487.493.484,58	1.100.741.220,42	44,25
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	1.323.659.418.447,56	1.801.964.718.767,44	(478.305.300.319,88)	-26,54
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.494.624.358,44	-4.387.324.763,76	16.881.949.122,20	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(12.494.624.358,44)	4.387.324.763,76	(16.881.949.122,20)	-384,79
	POS LUAR BIASA	1.311.164.794.089,12	1.806.352.043.531,20	(495.187.249.442,08)	-27,41



KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
11.02.00	Beban Luar Biasa	540.899.999,00	746.426.000,00	(205.526.001,00)	-27,53
		(540.899.999,00)	(746.426.000,00)	205.526.001,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.310.623.894.090,12	1.805.605.617.531,20	(494.981.723.441,08)	-27,41

Pelatihari, 27 Juni 2024

Kepala Badan





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	1.367.843.531.947,40	969.089.985.044,27
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.310.623.894.090,12	1.805.605.617.531,20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	6.910.116.294,39	13.792.190.264,13
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(1.732.863.472.546,76)	(1.710.242.147.238,60)
EKUITAS AKHIR	952.514.069.785,15	1.078.245.645.601,00

Ponohari, 27 Juni 2024

Kepala Badan

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 196612271987031002



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

UNTUK TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

(AUDITED)

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan dan sebagai fungsi akuntabilitas dari dana yang dikelola, maka penyusunan laporan keuangan yang transparan mutlak dilakukan, sebagai kewajiban atas integritas, kinerja dan kepengurusan keuangan juga sebagai informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dapat kami sampaikan beberapa hal yang merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tahap awal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana laporan keuangan yang dihasilkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 25 Desember 2022 maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan BPKAD
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan
 - b. Sub Bidang Anggaran
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
- 5) Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Inventaris

- 6) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan & Pemindahtanganan
 - b. Sub Bidang Pengamanan & Pemeliharaan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023 memiliki Aparatur Sipil Negara berjumlah 42 orang dan Honorer / PTT berjumlah 18 orang. Sedangkan PNS dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

(1) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

- S-2 : 1 orang
- S-1 : 21 orang
- D-III : 15 orang
- D- II : - orang
- SLTA : 6 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

(2) BERDASARKAN GOLONGAN

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 6 orang
- III/c : 8 orang
- III/b : 5 orang
- III/a : 11 orang
- II/d : 6 orang
- II/c : - orang
- II/b : - orang
- II/a : - orang
- I/d : - orang

(3) BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN STAF

- Esclon II : 1 orang
- Esclon III : 5 orang
- Esclon IV : 11 orang
- Staf : 24 orang
- Jabatan Fungsional : 1 orang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.4 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);

- 21) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 .
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 119).

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keaunagn pemerintah daerah 3.1.1 Pendapatan-LRA 3.1.2 Belanja 3.1.3 Pendapatan-LO 3.1.4 Beban 3.1.5 Aset 3.1.6 Kewajiban 3.1.7 Ekuitas Dana 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Berpedoman pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Berpedoman pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1. Pendapatan asli daerah

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau telah dibatalkan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.

1.2. Dana perimbangan

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH) baik DBH-Pajak, DBH- Sumber Daya Alam maupun DBH minyak/ gas/ pertambangan lainnya dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi sementara/ perkiraan alokasi DBH 2023, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2023.
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum

diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2021.

- c) Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dan DAU dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR- RI.

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2021, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/ kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA kabupaten/ kota penerima bantuan.
- d) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak

mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pada tahun 2023, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bunga (jika ada), dan belanja barang dan jasa yang wajib/ mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/ kegiatan wajib/ mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
- c. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program penguatan Pembangunan Perdesaan, Operasional perangkat desa.
- f. Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- h. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- i. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2023.

- j. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- k. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

2.2.3 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (mumi) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.761.088.881.265,- dan anggaran belanja daerah sebesar Rp2.255.548.951.409,- sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp Rp (494.460.070.144,-) serta Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp552.779.266.935,-, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp58.318.896.928,- sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp494.460.370.007,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp 299.863,-.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kabupaten Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.739.292.358.915,- dan Belanja Daerah Rp2.502.266.740.528,- dengan defisit sebesar Rp (762.974.381.613,-), serta Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp906.703.550.940,-, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp58.318.896.928,- dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 adalah jumlah surplus sebesar Rp85.410.272.399,-.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp56.459.861.976,96 dan belanja sebesar Rp29.584.198.878,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp27.164.136.946,96. Data yang digunakan berasal dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2023.

2.2.4 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya diatas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2023 mencapai 92,39 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2023 sebesar Rp68.352.202.569,76 dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp44.186.674.341,00 atau realisasi sebesar 154,69%. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami kenaikan sebesar Rp35.389.505.814,95 atau sebesar 107,36% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2022 sebesar Rp32.962.696.754,81.

Grafik 1 Realisasi PAD 2023

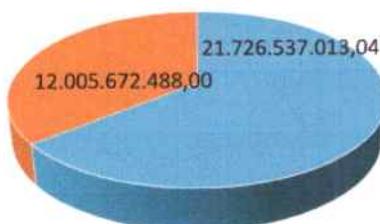
Realisasi PAD 2023



■ Pendapatan Asli Daerah

Grafik 2 Rincian Realisasi PAD 2023

RINCIAN REALISASI PAD 2023



■ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
■ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama Tahun 2023 sebesar Rp12.005.672.488,00 dari Anggaran Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp12.005.308.674,00 atau realisasi sebesar 100,003%. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp994.862.104,00 atau 8,29% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 11.010.810.384,00. Perbandingan Tahun 2023 dari Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

N o.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN Bank Katsel	11.394.000.000,00	11.394.363.814,00	10.425.528.033,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Baratata Tuntung Pandang	461.308.674,00	461.306.674,00	479.277.014,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BPR	150.000.000,00	150.000.000,00	106.005.337,00
	Jumlah	12.005.308.674,00	12.005.672.488,00	11.010.810.384,00

2) LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp56.459.861.976,96 sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp Rp21.726.537.013,04. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Lain- Lain PAD Yang Sah

N o.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	164.391.200,00	0,00
2	Hasil Sewa BMD	325.000.000,00	310.814.345,00	535.410.242,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	4.984.000.000,00	9.465.098.770,06	18.601.322.402,20
4	Jasa Giro Kas di Bendahara	180.000.000,00	274.578.375,84	383.925.787,27
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	(177.971.350,00)
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	24.000.000.000,00	42.088.043.095,68	0,00
7	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	28.000.000,00	69.502.072,50	456.046.407,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.000.000,00	69.502.072,50	456.046.407,00
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	46.750.000,00	0,00
11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	113.000.000,00	134.984.677,36	1.577.347.073,84

13	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	989.287,14	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	81.301.970,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	9.411.616,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	51.000.000,00	0,00	100.000.000,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	654.000,00	1.167.000,00	14.931.174,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	92.659.000,00	115.066.023,00	323.991.385,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.632.500,00	7.838.819,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan JKN	0,00	0,00	2.494.640,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	32.757.490,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	1.632.500,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	195.786.464,00	196.266.464,75	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	44.800.000,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	72.941.175,00	72.941.175,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	269.500,00	12.775.500,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	23.960.100,00	23.960.100,00	0,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	77.200,00	0,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	50.421.300,00	104.658.300,00	0,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	120.122.000,00	0,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	23.830.000,00	23.830.000,00	0,00
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	184.998.891,00	209.211.182,65	0,00
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	94.407.777,00	117.135.677,87	0,00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	16.336.100,00	0,00
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.295.936.606,00	1.537.955.709,67	0,00
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	133.844.454,00	406.197.854,00	0,00
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	276.537.500,00	276.537.500,00	0,00

39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	166.267.750,81	0,00
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	54.118.900	367.058.529,63	0,00
41	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan dari pengembalian hasil temuan pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
43	Pendapatan dari Pengembalian Potongan Pensiun	0,00	0,00	0,00
44	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa	0,00	0,00	0,00
45	Pendapatan dari Pengembalian Sisa UP (UYHD) Tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00
46	Pendapatan dari Pengembalian Klaim Asuransi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.186.674.341,00	56.459.861.976,96	21.726.537.013,04

3) PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2023 sebesar Rp2.035.175.446.538,00 lebih besar dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.522.295.931.980,00. Pendapatan Transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp71.969.463.263,00 atau sebesar 3,67% dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.963.205.983.275,00. Rincian Pendapatan Transfer tersebut dapat dilihat pada grafik 3 dibawah berikut:

Grafik 3 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer 2023

Pendapatan Transfer 2023



2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama Tahun 2023 Rp1.834.460.603.846,00 melebihi anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp1.400.436.231.980,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp52.632.861.724,00 atau 2,95% terhadap realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.781.827.742.122,00.

Pendapatan transfer pemerintah pusat pada Tahun 2023 berupa pendapatan Dana Perimbangan, dan dari Dana Desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Kode Rek	Rincian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.287.512.438.980,00	1.721.614.621.526,00	1.667.151.026.122,00
4.2.01.01	Dana Desa	112.923.793.000,00	112.714.842.692,00	104.093.790.400,00
		1.400.436.231.980,00	1.834.460.603.846,00	1.771.244.816.522,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.721.614.621.526,00 dan Rp 1.667.151.026.122,00 dengan kenaikan realisasi sebesar Rp 54.463.595.404,00 atau 3,27%. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas:

Tabel 4 Rincian Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	548.181.440.800,00	996.224.548.856,00	936.789.879.264,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	493.534.142.000,00	511.784.754.631,00	491.839.636.893,00
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.473.033.180,00	66.466.496.948,00	89.691.850.759,00
4	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.323.823.000,00	147.138.821.091,00	148.829.659.206,00
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.287.512.438.980,00	1.721.614.621.526,00	1.667.151.026.122,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana alokasi desa selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 112.845.982.320,00 dan Rp 104.093.790.400,00 dengan kenaikan sebesar 8.752.191.920,00 atau 8,41%.

3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan Transfer berikutnya adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun 2023 Rp200.714.842.692,00 melebihi anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp121.859.700.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp19.096.621.939,00 atau 10,51% terhadap realisasi Tahun 2022 sebesar Rp181.618.220.753,00. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0001	Pendapatan BHP Kendaraan Bermotor	11.416.222.816,00	16.798.599.935,00	22.554.874.481,00
0002	Pendapatan BBNKB	10.002.982.258,00	13.809.891.493,00	12.669.510.340,00
0003	Pendapatan BHP Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87.561.093.343,00	150.849.282.634,00	27.866.382.092,00
0004	Pendapatan BHP Air Permukaan	578.433.029,00	794.463.634,00	432.495.949,00
0005	Pendapatan BHP Rokok	12.300.968.554,00	18.462.604.996,00	18.094.957.891,00
		121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	181.618.220.753,00

1) LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Asli Daerah yang ketiga bersumber dari Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Yang Sah selama Tahun 2023 sebesar Rp271.184.404,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1.	Pendapatan Hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.288.000.000,00	(100)
2.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.156.000.000,00	51.220.225,00	(4,43)	0,00	100
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	43.964.169,00	219.964.179,00	500,33	855.662.071,00	(389)
	Jumlah	1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	2.143.662.071,00	(790,48)

3. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi untuk tahun anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang realisasi masing- masing sebesar Rp7.605.725.320,00, dan Rp9.177.351.558,00 dengan total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp16.783.076.878,00. Sedangkan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 26.849.213.345,92, maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.066.136.467,92 atau sebesar 37,49% dari tahun sebelumnya.

Penurunan signifikan tersebut disebabkan karena rekening- rekening seperti Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKD, serta Pimpinan dan Anggota DPRD berada di unit organisasi masing- masing.

Grafik 4 Realisasi Belanja Operasi 2023

Belanja Operasi



(1) BELANJA PEGAWAI

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp7.605.725.320,00 dan Rp7.409.582.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.446.485.348,00	3.264.936.469,00	94,73	2.883.483.731,00	13,23
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	14.860.000,00	0,00	0	0,00	-
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.667.283.995,00	4.340.788.851,00	93,00	4.526.098.789,00	(4,09)
4	Belanja Tambahan Penghasilan PPPK	20.504.000,00	0,00	0	0,00	-
	Jumlah	8.149.133.343,00	7.605.725.320,00	93,33	7.409.582.520,00	2,65

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp195.952.800,00 atau sebesar 2,65% dari tahun sebelumnya.

(2) BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
10.432.592.023,0 0	9.176.131.558,00	8.116.345.761,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp9.176.131.558,00 dan Rp8.116.345.761,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.428.427.746,00 dan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.559.293.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.678.759.177,00	1.428.427.746,00	85,09	977.739.430,00	46,09%
2	Belanja Jasa Kantor	1.586.619.996,00	1.288.750.519,00	81,23	1.472.480.084,00	(12,48)
4	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	35.568.000,00	29.919.960,00	84,12	27.874.915,00	7,34
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.415.276.000,00	4.144.108.800,00	93,86	4.287.926.091,00	(3,35)
7	Belanja Sewa Gedung/Bangunan	500.000,00	0,00	-	0,00	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	111.000.000,00	96.514.500,00	86,95	90.015.000,00	7,22
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.885.650,00	118.346.575,00	89,73	74.025.500,00	59,87
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.113.200,00	38.710.500,00	96,50	10.685.000,00	262,29
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.432.870.000,00	2.032.572.958,00	83,55	1.175.599.741,00	72,90
	Jumlah	10.432.592.023,00	9.176.131.558,00	87,96	8.116.345.761,00	13,06

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.059.785.797,00 atau sebesar 13,06% dari tahun sebelumnya.

4. BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp38.954.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.750.658.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.920.000,00, Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan Irigasi sebesar Rp0,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.

Grafik 5 Realisasi Belanja Modal 2023



(1) BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
200.572.639,00	38.954.000,00	228.002.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp38.954.000,00 dan Rp228.002.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi (Rp)	
			(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	200.572.639,00	38.954.000,00	19,42	228.002.000,00	(82,92)
	Jumlah	200.572.639,00	38.954.000,00	19,42	228.002.000,00	(82,92)

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp189.048.000,00 atau sebesar (82,92%) dari tahun sebelumnya.

(2) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
13.260.545.300,00	12.750.658.000,00	3.267.078.630,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp12.750.658.000,00 dan Rp3.267.078.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.259.314.200,00	11.828.168.000,00	96,48	3.210.150.000,00	268,46
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	712.631.100,00	663.530.000,00	93,11	40.828.630,00	1525,16
3	Belanja Modal Alat Laboratorium-Power Supply	26.640.000,00	24.000.000,00	90,09	0,00	-
4	Belanja Modal Komputer Unit	170.940.000,00	153.360.000,00	89,72	0,00	-
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	91.020.000,00	81.600.000,00	89,65	16.100.000,00	406,83
	Jumlah	13.260.545.300,00	12.750.658.000,00	96,15	3.267.078.630,00	390,28

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.483.579.370,00 atau sebesar 390,28% dari tahun sebelumnya.

(3) BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
13.386.098,00	12.920.000,00	26.552.400,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp12.920.000,00 dan Rp26.552.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	-	26.552.400,00	-
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	13.386.098,00	12.920.000,00	96,52	0,00	-
	Jumlah	13.386.098,00	12.920.000,00	96,52	26.552.400,00	(51,34)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.920.000,00 atau sebesar -% dari tahun sebelumnya.

(4) BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

(5) BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	(364.530.000,00)

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(364.530.000,00). Rincian Belanja Aset Tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	-	(379.130.000,00)	100
2	Belanja Modal Software	0,00	0,00	-	14.600.000,00	(100)
	Jumlah	0,00	0,00	-	(364.530.000,00)	100

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp364.530.000,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

(6) BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	0,00	379.130.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp379.130.000,00. Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	-	379.130.000,00	(100)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Jumlah	0,00	0,00	-	364.530.000,00	(100)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp364.530.000,00 atau sebesar (100%) dari tahun sebelumnya.

3.1.2 NERACA

1. ASET LANCAR

(1) KAS DI KAS DAERAH

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	762.266.975.672,06

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp762.266.975.672,06.

(2) KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Posisi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan 0,00.

(3) KAS DI BENDAHARA BOS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
131.310.530.756,00	75.266.414.262,00

Posisi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp131.310.530.756,00 dan Rp75.266.414.262,00.

(4) KAS LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	8.205.695.000,00

Posisi Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp8.205.695.262,00

(5) PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

31 DESEMBER 2023 (RP)	31 DESEMBER 2022 (RP)
486.943.067,00	486.943.067,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp486.943.067,00 dan Rp486.943.067,00. Saldo tersebut berasal dari saldo tahun sebelumnya dan tidak ada penambahan maupun pengurangan atau koreksi di tahun 2024.

(6) PIUTANG LAIN- LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
34.381.142.263,12	24.774.027.695,24

Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah terdiri dari Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF), Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain, Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Terhadap Bendahara, serta Piutang Hasil Kerja sama Daerah. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uralan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	77.830.638.12	(77.830.638.12)	(100)
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis Bahan- Bahan Lainnya	0,00	24.099.500,00	(24.099.500,00)	(100)
3	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	33.000.000.000,00	23.350.290.638,12	9.649.709.361,88	41,33
4	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	111.055.000,00	(111.055.000,00)	(100)
5	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	292.251.833,12	360.299.547,12	(68.047.714,00)	(18.89)

6	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	977.835.430,00	952.382.510,00	25.452.920,00	2,67-
	Jumlah	34.381.142.263,12	24.774.027.695,24	9.607.114.567,88	38,78

(7) PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
226.152.417.256,00	0,00

Saldo Piutang transfer pemerintah pusat- Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Piutang Dana Transfer Umum berupa DBH PBB, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH SDA Minyak Bumi, selain juga bersumber dari DBH SDA Mineral dan Royalti Batubara, serta Piutang Dana Transfer Umum berupa DBH SDA Kehutanan- PSDH. Adapun rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	16.972.083.986,00	0,00	16.972.083.986,00	100
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	2.464.994.103,00	0,00	2.464.994.103,00	100
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 26 dan Pasal 29/WPOPDN	6.642.000,00	0,00	6.642.000,00	100
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	219.671.645,00	0,00	219.671.645,00	100
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti	206.150.705.000,00	0,00	206.150.705.000,00	100
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	338.320.070,00	0,00	338.320.070,00	100
	Jumlah	226.152.417.256,00	0,00	226.152.417.256,00	100

(8) PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
58.444.898.394,85	50.656.124.065,67

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bahan bakar kendaraan bermotor, Air permukaan, serta Piutang bagi hasil pajak rokok. Adapun Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp58.444.898.394,85 dan Rp50.656.124.065,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Piutang Transfer Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.301.386.141,37	(4,98)	4.301.386.136,39	863.732.056,90
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.648.325.531,21	(0,07)	3.648.325.531,14	(52.118.936,159,14)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.272.851.908,27	47.040.468.116,72	232.383.791,55	0,49
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	224.920.419,00	147.726.897,00	77.193.52,00	34,32
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.390.735.535,00	3.074.607.917,00	316.127.618,00	10,28
	Jumlah	58.444.898.394,85	50.656.124.065,67	7.788.774.329,18	15,38

(9) PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(15.908.251.323,06)	(9.515.579.754,62)

Penyisihan Piutang dialokasikan untuk penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain- lain PAD yang Sah, serta penyisihan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah – tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp (15.908.251.323,06) dan Rp(9.515.579.754,62) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(2.434.715,34)	0,00	(2.434.715,34)	100
2	Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	(15.924.114.321,72)	(9.515.579.754,62)	6.408.534.567,1	67,3
3	Penyisihan piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah – tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain	0,00	0,00	0,00	-
4	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.297.714,00	0,00	18.297.714,00	100
	Jumlah	(15.908.251.323,06)	(9.515.579.754,62)	6.392.671.568,44	67,18

(10) BEBAN DIBAYAR DIMUKA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
--------------------------	--------------------------

1.781.232,00

0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.781.232,00 dan Rp0,00. Saldo Beban dibayar dimuka tersebut merupakan beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Tahun 2023.

(11) **PERSEDIAAN**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

9.735.500,00

8.289.100,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp9.735.500,00 dan Rp8.289.100,00. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari Belanja APBD. Rincian saldo persediaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis	3.435.500,00	3.804.100,00	(368.600,00)	(9,69)
2	Kertas dan Cover	3.000.000,00	985.000,00	2.015.000,00	204,57
4	Benda Pos	1.800.000,00	3.500.000,00	(1.700.000,00)	(48,57)
5	Bahan Komputer	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100
	Jumlah	9.735.500,00,00	8.289.100,00	1.446.400,00	17,45

2. **INVESTASI JANGKA PANJANG**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

170.343.210.534,27

144.405.364.828,06

Saldo Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp170.343.210.534,27 dan Rp144.405.364.828,06. Adapun rincian investasi tersebut yaitu:

Tabel 19 Rincian Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	31.650.063.606,27	34.031.114.828,06	(2.381.051.221,73)	(7,00)
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	138.693.146.928,00	110.374.250.000,00	28.318.896.928,00	25,66
	Jumlah	170.343.210.534,27	144.405.364.828,06	25.937.845.706,21	17,96

3. ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(29.444.170.365,02)	202.658.409.950,82

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(29.444.170.365,02) dan Rp202.658.409.950,82 terdiri atas:

Tabel 20 Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Tanah	194.450.545.560,04	194.946.396.723,77	(495.851.163,73)	(0,25)
2.	Peralatan dan Mesin	13.536.035.489,90	6.718.024.945,15	6.818.010.544,75	101,49
3.	Gedung dan Bangunan	(6.195.112.905,86)	10.351.568.784,39	(16.546.681.690,25)	(159,85)
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.289.967.205,08,00	85.977.100,00	39.203.990.105,08	45.598,18
5.	Aset Tetap Lainnya	27.410.196,00	2.200.000,00	25.210.196,00	1.145,92
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	539.361.379,00	0,00	539.361.379,00	100,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(271.092.377.289,18)	(9.445.757.602,49)	(261.646.619.686,69)	2.769,99
	Jumlah	(29.444.170.365,02)	202.658.409.950,82	(232.102.580.315,84)	(114,53)

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

(7) TANAH

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
194.450.545.560,04	194.946.396.723,77

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp194.450.545.560,04 dan Rp194.946.396.723,77. Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp495.851.163,73) atau sebesar (0,25%) dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Saldo Tanah

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	194.946.396.723,77	231.088.880.024,94	(36.142.483.301,17)	(15,64)
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	-	-	-	-
	- Penilaian:	38.954.000,00	228.002.000,00	(189.048.000)	(82,92)
	- Mutasi Unit Kerja	-	-	-	-
	- Reklasifikasi	22.272.550,00	-	22.272.550,00	100

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	835.937.500,00	-	835.937.500,00	100
	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	-	-	-	-
	- Reklasifikasi	505.928.841,00	-	505.928.841,00	100
	- Penghapusan	887.086.372,73	-	887.086.372,73	100
	- Koreksi Kurang Aset Tetap		(36.370.485.301,17)	36.370.485.301,17	100
	Jumlah	194.450.545.560,04	194.946.396.723,77	38.954.000,00	0,02

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2023 berasal dari belanja modal Tanah Persil sebesar Rp38.954.000,00, dari reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan tanah persil sebesar Rp22.272.550,00, serta dari Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp835.937.500,00. Sedangkan nilai pengurang berasal dari reklasifikasi Rp505.928.841,00 dan penghapusan aset sebesar Rp887.086.372,73.

(8) PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2023

(Rp)

13.536.035.489,90

31 Desember 2022

(Rp)

6.718.024.945,15

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.536.035.489,90 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.718.024.945,15. Realisasi peralatan dan mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.818.010.544,75 atau sebesar 101,49% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp6.818.010.544,75 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.2.01.03.0003	Compressor	0,00
2.	1.3.2.01.03.0005	Pompa	0,00
3.	1.3.2.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00
4.	1.3.2.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.	1.3.2.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	4.412.730.981,59
6.	1.3.2.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	918.100.000,00
7.	1.3.2.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	716.568.000,00

8	1.3.2.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00
9	1.3.2.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00
10	1.3.2.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	0,00
11	1.3.2.03.02.0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00
12	1.3.2.03.03.0001	Alat Ukur Universal	0,00
13	1.3.2.03.03.0008	Alat Ukur Pembanding	0,00
14	1.3.2.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00
15	1.3.2.05.01.0001	Mesin Ketik	0,00
16	1.3.2.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00
17	1.3.2.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00
18	1.3.2.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	0,00
19	1.3.2.05.02.0001	Mebel	629.010.000,00
20	1.3.2.05.02.0003	Alat Pembersih	0,00
21	1.3.2.05.02.0004	Alat Pendingin	0,00
22	1.3.2.05.02.0005	Alat Dapur	0,00
23	1.3.2.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(151.878.437,00)
24	1.3.2.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	0,00
25	1.3.2.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	0,00
26	1.3.2.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	0,00
27	1.3.2.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	81.130.555,55
28	1.3.2.06.01.0004	Peralatan Cetak	0,00
29	1.3.2.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00
30	1.3.2.06.03.0047	Sumber Tenaga	0,00
31	1.3.2.08.04.0005	System/Power Supply	24.000.000,00
32	1.3.2.08.08.0006	Peralatan Umum	0,00
33	1.3.2.10.01.0002	Personal Computer	153.360.000,00
34	1.3.2.10.02.0001	Peralatan Mainframe	0,00
35	1.3.2.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	81.600.000,00
36	1.3.2.10.02.0004	Peralatan Jaringan	0,00
Jumlah			6.818.010.544,75

(9) GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(6.195.112.905,86)	10.351.568.784,39

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar dan 2022 sebesar Rp(6.195.112.905,86) dan Rp10.351.568.784,39. Realisasi Bangunan dan Gedung Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar

(Rp16.546.681.690,25) atau sebesar (159,85%) dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	10.351.568.784,39	8.139.978.163,39	2.211.590.621,00	27,17
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	2.784.824.343,00	2.211.590.621,00	573.233.722,00	25,92
	- Mutasi Unit Kerja	-	-	-	-
	- Reklasifikasi	4.096.974.295,00	-	4.096.974.295,00	100
	- Hibah dan Koreksi Tambah	177.749.750,00	-	177.749.750,00	100
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	13.050.000,00	-	13.050.000,00	100
	- Mutasi Unit Kerja	-	-	-	-
	- Reklasifikasi	8.018.804.550,00	-	8.018.804.550,00	100
	- Penghapusan	-	-	-	-
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	15.574.375.528,25	-	15.574.375.528,25	100
	Jumlah	(6.195.112.905,86)	10.351.568.784,39	(16.546.681.690,25)	(159,85)

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan signifikan berasal dari reklasifikasi sebesar Rp8.018.804.550,00 dan koreksi kurang termasuk defisit terhadap aset tetap sebesar Rp15.574.375.528,25.

(10) JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
39.289.967.205,08	85.977.100,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp39.289.967.205,08 dan Rp85.977.100,00. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan terhadap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.203.990.105,08 atau sebesar 45598,18%.

Kenaikan yang sangat signifikan terhadap jalan, irigasi dan jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten	17.761.793.238,00
2.	1.3.4.04.01.0005	Jalan Desa	20.815.582.958,00
3.	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	623.862.909,08

4.	1.3.4.04.01.0005	Jaringan Air Minum Lainnya	2.751.000,00
Total Penambahan			39.203.990.105,08

(11) **ASET TETAP LAINNYA**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
27.410.196,00	2.200.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp27.410.196,00 dan Rp2.200,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa aset buku dan aset tanaman. Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan terhadap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.210.196,00 atau sebesar 1145,92%.

(12) **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
539.361.379,00	0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp539.361.379,00 dan Rp0,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa aset buku dan aset tanaman. Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan terhadap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.210.196,00 atau sebesar 1145,92%.

Tabel 25 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.6.02.01.0004	KDP- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	493.438.841,00
2.	1.3.6.02.01.0005	KDP- Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga	(9.782.550,00)
3.	1.3.6.03.02.0002	KDP- Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.322.827.100,00)
4.	1.3.6.04.01.0001	KDP- Bangunan Gedung Kantor	762.079.218,00
5.	1.3.6.05.01.0009	KDP- Jalan Khusus	517.662.970,00
6.	1.3.6.05.04.0005	KDP- Jaringan Air Minum Lainnya	98.790.000,00
Jumlah			539.361.379,00

(13) **AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(271.092.377.289,18)	(9.445.757.602,49)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar

(Rp271.092.377.289,18) dan (Rp9.445.757.602,49). Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dapat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan %	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	Akum. Penyusutan Alat Bantu	(15.794.642,00)	-	-	(15.794.642,00)	-
2	Akum. Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(3.273.183.854,64)	-	72.746.377.296,19	(76.019.561.150,83)	(2322,50)
3	Akum. Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(29.521.680,32)	-	-	(29.521.680,32)	-
4	Akum. Penyusutan Alat Pengolahan	(281.667,00)	-	-	(281.667,00)	-
5	Akum. Penyusutan Alat Kantor	(471.729.021,00)	-	-	(471.729.021,00)	-
6	Akum. Penyusutan Alat Rumah Tangga	(466.398.471,27)	-	-	(466.398.471,27)	-
7	Akum. Penyusutan Alat Studio	(166.383.505,55)	-	-	(166.383.505,55)	-
8	Akum. Penyusutan Alat Laboratorium	(50.756.294,00)	-	-	(50.756.294,00)	-
9	Akum. Penyusutan Komputer Unit	(1.134.096.893,71)	-	-	(1.134.096.893,71)	-
10	Akum. Penyusutan Gedung Tempat Kerja	(3.524.570.991,00)	2.271.453.109,00	39.592.595.237,66	(40.845.713.119,66)	1158,88
11	Akum. Penyusutan Tugu Tanda Batas	(300.014.444,00)	-	-	(300.014.444,00)	-
12	Akum. Penyusutan Jalan	(0,00)	402.383.614,00	151.981.063.868,84	(151.578.680.254,84)	(100)
13	Akum. Penyusutan Bangunan Air Kotor	(1.414.233,00)	-	-	(1.414.233,00)	-
14	Akum. Penyusutan Jaringan Listrik	(11.611.905,00)	-	-	(11.611.905,00)	-
15	Akum. Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	0,00	-	420.007,00	(420.007,00)	(100)
	Jumlah	(9.445.757.602,49)	2.673.836.723,00-	264.320.456.409,69	(271.092.377.289,18)	2869,99

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp264.320.456.409,69, berupa beban penyusutan sebesar Rp118.313.997.103,55, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp76.523.304.633,89;
- 2) Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp38.924.769.590,66;
- 3) Beban Penyusutan Jalan sebesar Rp2.865.922.879,00;

Penambahan lainnya berupa defisit dari kegiatan non operasional lainnya – LO sebesar Rp6.264.550.816,70 serta koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp883.996.017,00 akibat dari selisih perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMDA BMD.

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp264.320.456.409,69.

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

4. DANA CADANGAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	56.160.390.391,32

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp56.160.390.391,32. Saldo tersebut merupakan saldo awal dana cadangan sebesar Rp56.160.390.391,32 yang mengalami penambahan transfer sebesar Rp20.000.000, kemudian dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp75.000.000,- serta pencairan atas jasa giro pada rekening dana cadangan sebesar Rp1.160.30.391,32 sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00.

5. ASET LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
188.846.433,35	321.122.551.595,50,00

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp188.846.433,35 dan Rp321.122.551.595,50 terdiri atas:

Tabel 27 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Software	57.309.000,00	57.309.000,00	-
2	Aset Tak berwujud Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3	Aset Rusak Berat/ Usang	1.028.718.986,74	322.104.661.370,51	(321.075.942.383,77)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	(100.449.000,00)	100.449.000,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	31.900.000,00	44.820.000,00	(12.920.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(1.033.789.775,01)	(1.033.789.775,01)	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain – Aset rusak berat/ Usang	155.157.221,62	0,00	155.157.221,62
Jumlah		188.846.433,35	321.122.551.595,50	(320.933.705.162,15)

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(1) ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>107.309.000,00</u>	<u>107.309.000,00</u>

Saldo Aset tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp107.309.000,00 dan Rp107.309.000,00. Aset tidak berwujud terdiri dari Software dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. Pada Tahun 2023 Software nilai bruto Software sebesar Rp57.309.000,00 dengan nilai Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp100.449.000,00, sehingga nilai netto sebesar Rp(43.140.000,00).

Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya pada Tahun 2022 dan 2023 mempunyai besaran yang tetap sebesar Rp57.309.000,00, dengan nilai Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp44.820.000,00, sehingga nilai netto sebesar Rp5.180.000,00. Dengan catatan bahwa Amortisasi yang telah diakui sebagai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2023 sebesar Rp12.920.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Amortisasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	57.309.000,00	-	100.449.000,00	(43.140.000,00)	(100.449.000,00)	(175,28)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	-	44.820.000,00	5.180.000,00	(44.820.000,00)	(89,64)
	JUMLAH	107.309.000,00	-	145.269.000,00	(37.960.000,00)	(145.269.000,00)	(135,37)

(2) ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.028.718.986,74</u>	<u>322.104.661370,51</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.028.718.986,74 dan Rp322.104.661370,51. Aset lain-lain tersebut berupa Aset rusak berat/ usang. Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp321.075.942.383,77 atau sebesar 99,68% dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai Aset Lain-lain berasal dari Pencairan DBH sebesar Rp320.910.840,86, nilai akumulasi penyusutan senilai Rp155.157.221,62 serta defisit senilai Rp9.944.306,15 sehingga nilai netto sebesar Rp1.028.718.986,74.

(3) AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>(68.549.000,00)</u>	<u>(55.629.000,00)</u>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp68.549.000,00) dan (Rp55.629.000,00).

(4) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>(878.632.553,39)</u>	<u>(1.033.789.775,00)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(878.632.553,39) dan Rp(1.033.789.775,00). Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp(1.033.789.775,00) dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp155.157.221,62.

(5) UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>(3.871.951.804,00)</u>	<u>0,00</u>

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(3.871.951.804,00) dan Rp0,00. Terjadi kenaikan sebesar (Rp3.871.951.804,00) atau 100%.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) tersebut merupakan PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun, Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD, dan Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa, serta Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD. Rincian Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Penambah 2023	Pengurang 2023	(Saldo)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Saldo Awal			0,00
1	Utang PPh Pasal 21	3.899.017.754,00	27.065.950,00	3.871.951.804,00
2	Utang PPh Pasal 22	4.793.705,00	4.793.705,00	3.871.951.804,00
3	Utang PPh Pasal 23	12.246.219,00	12.246.219,00	3.871.951.804,00
4	Utang PPN Pusat	46.271.222,00	46.271.222,00	3.871.951.804,00
	Jumlah	3.962.328.900,00	90.377.096,00	3.871.951.804,00

(6) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>94.712.256,42</u>	<u>143.767.606,65</u>

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp94.712.256,42 dan Rp143.767.606,65. Terjadi penurunan sebesar Rp49.055.350,23 atau sebesar 34%.

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dengan saldo awal sebesar Rp143.767.606,65, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Penambah 2023	Pengurang 2023	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Saldo Awal			143.767.606,65
1	Koreksi ekuitas lainnya	1.737.836,98	0,00	145.505.443,63
2	Hasil sewa BMD-LO	131.966.034,00	182.759.221,21	94.712.256,42
	Jumlah	133.703.870,98	182.759.221,21	94.712.256,42

(7) UTANG BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>3.885.978.172,00</u>	<u>13.753.851,00</u>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.885.978.172,00 dan Rp13.153.968,00. Terjadi kenaikan saldo utang belanja sebesar Rp3.872.224.321,00 atau sebesar 281,54%.

Saldo utang Belanja tersebut merupakan utang belanja jasa kantor berupa tagihan telpon, utang belanja jasa pembayaran air, utang belanja jasa pembayaran listrik kantor BPKAD serta utang PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi beban Desember Tahun 2023 namun akan dibayar pada Tahun Anggaran 2024. Rincian tersebut antara lain:

Tabel 31 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Saldo Awal			0,00
1	Utang PPh 21 atas TPP	3.871.951.804,00	0,00	3.871.951.804,00
2	Utang Tagihan Telpon	241.150,00	0,00	3.872.192.954,00
3	Utang Tagihan Air	623.000,00	0,00	3.872.815.954,00
4	Utang Tagihan Listrik	13.162.218,00	0,00	3.885.978.172,00
	Saldo	3.885.978.172,00	0,00	3.885.978.172,00

(8) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>224.000.953.163,00</u>	<u>41.148.951.053,00</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp224.000.953.163 dan Rp41.148.951.053,00. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah dan Utang

Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Tabel 32 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	224.000.953.163,00	41.148.951.053,00	182.852.002.110,00	444,37
	Jumlah	224.000.953.163,00	41.148.951.053,00	182.852.002.110,00	444,37

6. EKUITAS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
954.514.069.785,15	1.367.843.531.947,40

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp954.514.069.785,15 dan Rp1.367.843.531.947,40 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp954.514.069.785,15 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022	Rp1.367.843.531.947,40
Ekuitas untuk dikonsolidasikan- RK PPKD	(Rp1.732.863.472.546,76)
Surplus/defisit Operasional	Rp1.310.623.894.090,12
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023	954.514.069.785,15

3.1.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 33 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	67.662.418.814,53	35.578.200.299,06	32.084.218.515,47	90,18
2	Pendapatan Transfer-LO	1.644.006.638.186,85	2.138.379.085.769,35	(494.372.447.582,50)	(23,12)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	4.699.252.440,04	2.160.461.889,00	2.538.790.551,04	117,51
	Jumlah	1.716.368.300.441,42	2.176.117.747.957,41	(459.749.438.515,99)	(21,13)

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Asli Daerah -LO terdiri dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO, Jasa Giro-LO, serta Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 34 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.394.363.814,00	11.342.521.973,11	51.841.840,89	0,41
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	909.465.245,00	905.327.378,83	4.137.866,17	0,03
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	291.634.730,00	290.307.856,34	1.326.873,66	0,01
	Jumlah	12.595.463.789,00	12.538.157.208,28	57.306.580,72	0,46

Tabel 35 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	164.391.200,00	272.956.563,12	(108.565.363,12)	(39,77)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	309.857.032,21	445.894.106,53	(135.079.761,53)	(30,29)
3	Jasa Giro-LO	8.579.286.754,58	19.615.761.014,65	(6.168.515.290,75)	(31,45)
4	Pendapatan Bunga-LO	42.010.212.457,56	0,00	38.380.474.517,68	100
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.406.019.447,50	518.315.758,00	(448.813.685,50)	(86,59)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	123.184.677,36	1.622.030.176,84	(1.487.045.499,48)	(91,68)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	106.762.907,14	0,00	91.702.873,14	100
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.367.240.549,18	565.087.472,00	3.248.909.095,38	574,94

Jumlah	55.066.955.025,53	23.040.043.090,78	32.026.911.935,75	139,01
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------

(2) PENDAPATAN TRANSFER- LO

Pendapatan Transfer –LO terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 36 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO	1.444.004.192.928,00	1.946.912.915.925,00	(502.908.722.997,00)	(25,83)
2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	0,00	10.342.946.000,00	(10.342.946.000,00)	(100)
3	Transfer Pemerintah Provinsi-LO	200.002.445.258,85	181.123.223.844,35	18.879.221.414,50)	10,42)
Jumlah		1.644.006.638.186,85	2.138.379.085.769,35	(494.372.447.582,50)	(23,12)

(3) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH- LO

Lain- lain Pendapatan Yang Sah – LO berasal dari Pendapatan Hibah-LO, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 37 Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Hibah -LO	4.699.252.440,04	2.160.461.889,00	2.538.790.551,04	117,51
Jumlah		4.699.252.440,04	2.160.461.889,00	2.538.790.551,04	117,51

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.538.790.551,04 atau 117,51%.

Tabel 38 Perbedaan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LRA dan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Hibah (LRA)	4.699.252.440,04
Hibah (LO)	4.699.252.440,04
Selisih	0,00

2. BEBAN - LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp392.708.890.993,86 dan Rp374.153.029.189,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	7.603.944.088,00	7.409.582.520,00	194.361.568,00	2,62
2	Persediaan	1.488.571.783,00	1.015.665.330,00	472.906.453,00	46,56
3	Jasa	5.460.776.296,00	5.878.708.249,00	(417.931.953,00)	(7,11)
4	Pemeliharaan	(32.837.786.813,00)	84.710.500,00	(32.922.497.313,00)	(38.864,00)
5	Perjalanan Dinas	2.032.572.958,00	1.174.860.241,00	857.712.717,00	73,01
6	Penyusutan dan Amortisasi	267.173.262.327,02	232.901.585.941,84	34.271.676.385,18	14,72
7	Penyisihan Piutang	6.392.544.303,84	3.064.169.783,55	3.328.374.520,29	108,62
8	Beban Transfer	131.806.771.346,00	120.136.253.140,00	11.670.518.206,00	9,71
9	Beban Lain-Lain	3.588.234.705,00	2.487.493.484,58	1.100.741.220,42	44,25
	Jumlah	392.708.890.993,86	374.153.029.189,97	18.555.861.803,89	4,96

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 18.555.861.803,89 atau sebesar 4,96% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

(I) BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.605.725.320,00 dan Rp7.409.582.520,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.071.917.497,00	2.060.583.737,00	11.333.760,00	0,55
2	Beban Tunjangan Keluarga	216.168.236,00	210.472.560,00	5.695.676,00	2,71
3	Beban Tunjangan Jabatan	182.770.000,00	184.030.000,00	(1.260.000,00)	(0,68)
4	Beban Tunjangan Fungsional	30.455.000,00	34.620.000,00	(4.350.000,00)	(12,56)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	55.275.000,00	54.400.000,00	1.060.000,00	1,95
6	Beban Tunjangan Beras	127.604.040,00	126.735.000,00	869.040,00	0,69
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	377.392.519,00	6.499.492,00	370.893.027,00	5.706,49
8	Beban Pembulatan Gaji	27.490,00	26.160,00	1.330,00	5,08
10	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	186.309.765,00	188.758.866,00	(2.449.101,00)	(1,30)
11	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.254.216,00	4.607.857,00	(353.641,00)	(7,67)
12	Beban luran Jaminan Kematian ASN	12.762.706,00	12.750.059,00	12.647,00	0,10
42	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.550.041.416,00	4.526.098.789,00	(976.057.373,00)	(21,57)
44	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	790.747.435,00	0,00	790.747.435,00	100,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	Jumlah	7.605.725.320,00	7.409.582.520,00	196.142.800,00	2,65

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp196.142.800,00 atau sebesar 2,65% dari tahun sebelumnya.

(2) BEBAN BARANG PAKAI HABIS

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.213.065.618,00 dan Rp1.015.665.330,00. Rincian Beban Barang Pakai Habis adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Barang Pakai Habis

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	500.422.818,00	494.015.980,00	6.406.838,00	1,30
2	Kertas dan Cover	39.506.400,00	39.472.000,00	34.400,00	0,09
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.702.400,00	43.408.050,00	6.294.350,00	14,50
4	Benda Pos	10.890.000,00	34.420.000,00	(23.530.000,00)	(68,36)
5	Alat Listrik	5.625.000,00	7.105.000,00	(1.480.000,00)	(20,83)
6	Bahan Komputer	23.871.500,00	36.399.000,00	(12.527.500,00)	(34,42)
7	Perabot Kantor	6.677.500,00	11.757.500,00	(5.080.000,00)	(43,21)
8	Suvenir/Cendera Mata	12.300.000,00	9.927.800,00	2.372.200,00	23,89
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(100,00)
22	Makanan dan Minuman Rapat	157.500.000,00	115.230.000,00	42.270.000,00	36,68
24	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	344.570.000,00	220.680.000,00	123.890.000,00	56,14
39	Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.300.000,00	0,00	40.300.000,00	100,00
42	Pakaian Batik Tradisional	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00	100,00
	Jumlah	1.213.065.618,00	1.015.665.330,00	197.400.288,00	19,44

Realisasi Beban Barang Pakai Habis Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp197.400.288,00 atau sebesar 19,44% dari tahun sebelumnya.

Penjelasan perbedaan antara Belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 42 Selisih Beban Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan (1)	1.678.759.177,00
Beban Persediaan (2)	1.213.065.618,00
Saldo Awal Persediaan (3)	8.289.100,00
Saldo Akhir Persediaan (4)	221.107.078,00
Selisih (5=1- (2+4-3))	252.875.581,00

(3) BEBAN JASA

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.460.776.296,00 dan Rp5.878.708.249,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.818.750,00	91.650.000,00	(47.300.000,00)	(51,61)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	339.145.000,00	336.015.000,00	3.130.000,00	0,93
3	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	86.500.000,00	90.000.000,00	(3.500.000,00)	(3,89)
4	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.750.000,00	68.400.000,00	(66.650.000,00)	(97,44)
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	326.800.000,00	342.000.000,00	(15.200.000,00)	(4,44)
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	100,00
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	311.600,00	1.569.400,00	(1.257.800,00)	(80,15)
9	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	13.000.000,00	(3.000.000,00)	(23,08)
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
11	Beban Jasa telepon	1.877.616,00	0,00	1.636.466,00	100,00
12	Beban Jasa listrik	162.697.074,00	149.195.343,00	14.093.364,00	9,45
	Beban Air	623.000,00	0,00	623.000,00	100,00
13	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	228.999.996,00	345.262.500,00	(116.262.504,00)	(33,67)
14	Beban Paket/Pengiriman	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.342.000,00	26.507.052,00	834.948,00	3,15
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.145.748,00	607.933,00	537.815,00	88,47
17	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.432.212,00	759.930,00	672.282,00	88,47
18	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.422.108.800,00	2.415.127.000,00	6.981.800,00	0,29
19	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.722.000.000,00	1.838.245.091,00	(116.245.091,00)	(6,32)
20	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	34.554.000,00	(34.554.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
21	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	(2.275.500,00)	90.015.000,00	6.499.500,00	7,22
		5.460.776.296,00	5.878.708.249,00	(417.931.953,00)	(7,11)

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (417.931.953,00) atau sebesar (7,11%) dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp576.984.999,00 yang merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke asset tetap Gedung dan bangunan. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 44 Selisih Beban Jasa

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa (1)	5.559.293.779,00
Beban Jasa (2)	5.460.776.296,00
Saldo Akhir Utang Beban (3)	3.885.978.172,00
Selisih {5=1- (2)+3}	3.984.495.655,00

(4) BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp32.837.786.813,00) dan Rp84.710.500,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.346.575,00	74.025.500,00	44.321.075,00	59,87
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.892.150.483,00	10.685.000,00	4.881.465.483,00	45685,22
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(37.848.283.871,00)	0,00	(37.848.283.871,00)	(100)
	Jumlah	(32.837.786.813,00)	84.710.500,00	(32.922.497.313,00)	(38864,72)

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp32.922.497.313,00) sebesar (38864,72%) dari tahun sebelumnya.

(5) BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.034.191.708,00 dan Rp1.174.860.241,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.721.571.708,00	186.255.000,00	124.155.000,00	66,66
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	311.001.250,00	988.605.241,00	735.176.467,00	74,37
	Jumlah	2.032.572.958,00	1.174.860.241,00	857.712.717,00	73,01

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp857.712.717,00,00 atau sebesar 73,01% dari tahun sebelumnya.

(6) BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 dan perubahan ketiga Nomor 218 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akruai pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.064.169.783,55. Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.434.715,34	0,00	2.434.715,34	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	6.408.407.302,50	2.990.064.400,00	3.418.342.902,50	87,47
3	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(18.297.714,00)	130.494.279,05	(148.791.993,05)	(114,02)
	Jumlah	6.392.544.303,84	3.064.169.783,55	3.328.374.520,29	108,62

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.328.374.520,29 atau sebesar 108,62%) dari tahun sebelumnya.

(7) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2023 sebesar Rp267.173.262.327,02 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp232.901.585.941,84.

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp267.173.262.327,02, sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp232.901.585.941,84

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	76.523.304.633,89	65.564.048.236,18	(65.564.048.236,18)	100,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.924.769.590,66	27.977.916.101,67	(27.977.916.101,67)	100,00
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	151.711.848.095,47	139.346.701.603,99	(139.346.701.603,99)	100,00
4	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	420.007,00	0,00	420.007,00	100,00
5	Beban Lain-Lain	3.588.234.705,00	0,00	3.588.234.705,00	100,00
	Jumlah	270.748.577.032,02	232.901.585.941,84	34.258.756.385,18	16,25

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.846.991.090,18 atau sebesar 14,70% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.920.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.920.000,00. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

(8) BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.806.771.346 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.136.253.140,00. Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.917.100.000,00	4.100.025.000,00	817.075.000,00	19,93
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.194.680.450,00	795.261.950,00	399.418.500,00	50,22
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	125.694.990.896,00	115.040.966.190,00	10.654.024.706,00	9,26
4	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	131.806.771.346,00	120.136.253.140,00	11.670.518.206,00	9,71

Realisasi Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.670.518.206,00 atau 9,71% dari tahun sebelumnya.

(9) BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp540.899.999,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp746.426.000,00. Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/ atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Perbandingan Beban Tak Terduga tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 51 Beban Tak Terduga

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Tak Terduga	Rp540.899.999,00	Rp746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)
	Jumlah	Rp540.899.999,00	Rp746.426.000,00	(205.526.001,00)	(27,53)

Realisasi Beban Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp205.526.001,00 atau sebesar 27,53% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Tak Terduga dengan Beban Tak Terduga tidak terdapat perbedaan realisasi.

3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

(1) DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.494.624.358,44 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp4.387.324.763,76). Rincian Surplus/ beban defisit non operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Surplus/ Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	beban defisit non operasional	12.494.624.358,44	(4.387.324.763,76)	16.881.949.122,20	(384,79)
	Jumlah	12.494.624.358,44	(4.387.324.763,76)	16.881.949.122,20	(384,79)

Realisasi Beban defisit non operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp266.508.072.510,21 atau (117,75%) dari tahun sebelumnya.

3.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp952.514.069.785,15 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.367.843.531.947,40 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.310.623.894.090,12 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.910.116.294,39 serta dikurangi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar (Rp1.732.863.472.546,76).

1. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.367.843.531.947,40 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022.

2. SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2023

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.310.623.894.090,12 berasal dari pendapatan (LO) Rp1.716.368.309.441,42 dikurangi beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp392.708.890.993,86 kemudian dikurangi Defisit dari kegiatan non operasional lainnya Rp12.494.624.358,44 serta dikurangi Beban luar biasa Rp540.899.999,00. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

3. DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp6.882.073.969,74. Rincian untuk masing masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 53 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	(1.153.211.790,37)	0,00
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	(127.264,60)	0,00
3	Koreksi ekuitas – Piutang	8.526.624.673,67	0,00
4	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya	2.888,00	0,00
7	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	(461.434.383,99)	0,00
8	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka	(1.737.836,98)	0,00
9	Koreksi ekuitas - Lainnya	(13.792.190.264,13)	0,00
	Jumlah Koreksi Ekuitas	(6.882.073.969,74)	0,00

Tabel 54 Rincian Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	Koreksi	
		Kurang	Tambah
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	1.157.711.790,37	4.500.000,00
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	127.264,60	0,00
3	Koreksi ekuitas – Piutang BHP-BBM	4,33	0,00
4	Koreksi Ekuitas - Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	25.452.920,00
5	Koreksi Ekuitas - Piutang BH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.473.404.629,00
6	Koreksi Ekuitas - Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	5.027.767.129,00
7	Koreksi Ekuitas – Ekuitas	13.792.190.264,13	0,00
9	Koreksi ekuitas –Utang kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan	2.888,00	0,00
10	Koreksi ekuitas –Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	920.388.318,16	810.274.423,04
	Koreksi Ekuitas – Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka usaha) - LO	325.608.447,00	183.973.717,00
	Koreksi Ekuitas – Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	209.685.758,87	0,00
11	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka	0,00	1.737.836,98
12	Koreksi ekuitas – Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	63.995.706,12	63.995.706,12
	Jumlah Koreksi Ekuitas	16.471.445.386,23	9.589.371.416,49

IV PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.567.682.570.490,00 dan terealisasi sebesar Rp2.103.798.833.511,76 atau 134,20%. Belanja dianggarkan sebesar Rp54.193.780.548,00 yang terealisasi sebesar Rp30.125.288.877,00 atau 55,59%. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/ aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (Audited) kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LK SKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**
MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002